

**TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA
(Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 454/ Pdt.P/
2018/PN.SKA)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Statra 1
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

ANDI WIBOWO

NIM: C.100.150.059

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA
(Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 454/ Pdt.P/
2018/PN.SKA)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

ANDI WIBOWO

C10050059

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji oleh :

Pembimbing



Dr. Rizka, S. Ag., M.H.

NIK :

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA
(STUDI PENETAPAN PN SURAKARTA NOMOR 454/Pdt.P/2018 PN
SURAKARTA)**

Oleh: •

Andi Wibowo

C100150059

Telah berhasil dipertahankan di depan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

DEWAN PENGUJI

1. **Dr. Rizka, SAg., M.H.**

(Ketua Dewan Penguji)

2. **Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum**

(Anggota Dewan Penguji I)

3. **Nuswardhani, S.H., S.U**

(Anggota Dewan Penguji II)

(.....)
(.....)
(.....)

Ditetapkan di : Surakarta
Tanggal : 14 Agustus 2019

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Dekan**



Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H

NIK : 537/NIDN.0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 21 Agustus 2019

Penulis



Andy Wibowo
C100150059

TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA
(Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 454/ Pdt.P/
2018/PN.SKA)

Abstrak

Perkawinan beda agama bahwa sebagai suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Adapun yang menjadi permasalahan antara lain yang pertama faktor penyebab perkawinan beda agama, yang kedua akibat hukum perkawinan beda agama terhadap putusan tersebut dan yang ketiga bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan tersebut. Dalam penulisan tersebut penulis menggunakan Desain kuantitatif deskriptif dengan hukum normatif digunakan dalam penelitian tersebut. Dari hasil penelitian, Faktor penyebab terjadinya perkawinan beda agama, adanya pengaruh budaya setempat, latar belakang orang tua, pendidikan yang minim tentang agama, keluarga bukan penentu perkawinan, rasa cinta satu sama lain dan kebebasan individu. akibat hukum perkawinan beda agama antara lain Keabsahan perkawinan beda agama tersebut, Pencatatan perkawinan, Status anak dan hak waris yang didapatkan orang tuanya. Pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan tersebut adalah adanya Diskresi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pernikahan, Agama

Abstract

Interfaith marriage that as a marriage conducted by people who embrace different religions and beliefs from one another. As for the problems, among others, the first factor causes of interfaith marriages, the second is due to interfaith marriages law against the decision and the third how judges considerations in granting the decision. In writing, the writer uses descriptive quantitative design with normative law used in the study. From the results of the study, factors causing interfaith marriages, the influence of local culture, parents' backgrounds, minimal education about religion, family is not a determinant of marriage, love for each other and individual freedom. The legal consequences of interfaith marital law include marriage validity these religious differences, marriage registration, status of children and inheritance rights obtained by their parents. The judge's consideration in setting the stipulation was the existence of Discretion in Law Number 1 of 1974 concerning marriage.

Keywords: Juridical Review, Marriages, Religion

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pernikahan adalah “sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Berdasarkan asas ini maka

¹ Ny. Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang*, Yogyakarta: Liberty, Hal. 138-139

setiap pernikahan memiliki hubungan yang erat dengan agama, oleh sebab itu maka Undang-undang No 1 tahun 1974 ini juga menyatakan bahwa” syarat sah sebuah pernikahan adalah apa bila dilakukan menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing calon pasangan nikah”.²

Di Indonesia terdapat beraneka macam agama, Sehingga dapat dilihat bahwa masyarakat yang berbeda agama bisa menjalin suatu ikatan yang mengarah kepada suatu perkawinan beda agama yang pada akhirnya hal tersebut akan memunculkan suatu permasalahan yang kemudian berakibat pada munculnya banyak pendapat mengenai perkawinan beda agama tersebut.

Perkawinan beda agama adalah “sesuatu yang sangat peka, bahkan pada tahun 1980 dipandang sebagai sesuatu yang sangat merisaukan umat Islam”.³ Pada agama Islam dan Kristen terdapat larangan dalam hal melakukan pernikahan beda agama tersebut, untuk umat yang beragama Islam telah diatur “dalam pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita karena keadaan tertentu seorang wanita yang tidak beragama Islam”.⁴”Dan disebutkan juga dalam Pasal 44 dijelaskan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. dalam hal ini dapat diketahui bahwa Islam melarang umatnya baik pria maupun wanita yang beragama Islam untuk menikahi seorang pria atau wanita yang tidak beragama Islam”.⁵ Larangan melakukan nikah beda agama tersebut “bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga serta akidah dan kemaslhatan umat Islam”.⁶ Dan juga dalam agama Katolik pernikahan beda agama juga telah diatur dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) tersebut dijelaskan dalam Kan 1086 §1 Bahwa “Perkawinan antar dua orang, yang diantaranya satu telah di baptis dalam gereja Katolik atau diterima didalamnya

² Ibid, hal 139

³ M. Karsayuda, 2006, *Perkawinan Beda Agama (Menakar Nilai-Nilai Keadilan Hukum Islam)*, Yogyakarta: Total Media, hal.3-4

⁴ Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, hal. 122

⁵ Ibid hal.123

⁶ Abdurrohman Kasdi, 2001, *Masail Fiqiyah Kajian Fiqih Atas Masalah-Masalah Kontemporer*, Kudus: Nora Media Enterprise, hal.125

dan tidak meninggalkannya dalam tindakan formal, sedangkan yang lain tidak dibaptis adalah tidak sah”.⁷

Dalam hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang tentang perkawinan terdapat larangan melakukan perkawinan yang mana oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku bagi masing-masing pihak dilarang untuk kawin, dalam kasus tersebut telah terjadi perkawinan antar beda agama yang mana mempelai pria beragama Katolik dan mempelai wanita beragama Islam. Didalam agama Katolik pernikahan beda agama terdapat larangan untuk melakukan perkawinan dengan agama lain tersebut telah diatur dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) yang mana sebuah perkawinan harus dilakukan berdasarkan dengan hukum agama dan hukum negara yang berlaku sedangkan dalam pandangan agama Islam perkawinan beda agama juga terdapat sebuah larangan untuk melakukan pernikahan beda agama telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasanya pernikahan yang bukan seiman atau seagama dilarang atau tidak sah yang mana sebuah perkawinan harus dilaksanakan menurut agama dan peraturan yang berlaku.

Bahwasanya telah diketahui dalam melakukan suatu perkawinan beda agama itu tidak diperbolehkan di negara Indonesia. Akan tetapi pada faktanya atau realitanya, terdapat beberapa peristiwa yang mana masyarakat Indonesia masih melakukan perkawinan beda agama tersebut. Hal itu, perlu menjadi suatu pertimbangan tentang Bagaimana cara mereka melakukan pernikahan beda agama tersebut mendapatkan suatu ijin dari para pihak yang berkaitan yang mempunyai suatu kewenangan sehingga dapat memberikan ijin untuk melaksanakan perkawinan beda agama tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 454/Pdt.P/ 2018/PN.SKA)

⁷ Kitab Hukum Kanonik 1983, “<http://www.imankatolik.or.id/khk.php?q=823-827>”, diakses Kamis 14 maret 2019, pukul 10.00

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan hukum normatif. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari – Juli 2019 di Pengadilan Negeri Surakarta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya pernikahan beda agama.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya bila dilihat dari segi etnis / suku bangsa dan agama. Konsekuensinya, dalam menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia dihadapkan kepada perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individunya. Yang menjadi perhatian dari pemerintah dan komponen bangsa lainnya adalah masalah hubungan antar umat beragama. Salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama ini adalah masalah Pernikahan Muslim dengan non-Muslim yang selanjutnya biasa disebut sebagai pernikahan beda agama.

Perkawinan sangatlah penting Dalam hal ini dengan adanya sebuah pernikahan beda berarti akan menimbulkan beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan beda agama tersebut. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama di indonesia;

- 1) Pergaulan hidup sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Di negara Indonesia sendiri memiliki berbagai suku dan agama yang beraneka ragam yang menjadikan masyarakat yang *Heterogen*. Dalam hal ini pergaulan tidak membatasi pergaulan antara anak yang beda agama karena adanya rasa toleransi antar agama hal ini sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia yang sudah terlalu erat dalam bergaul tanpa melihat adanya sebuah perbedaan agama yang satu dengan yang lainnya sehingga akan menimbulkan perasaan cinta walaupun kedua mengetahui akan adanya perbedaan agama diantara mereka.

- 2) Pendidikan agama yang minim. Karena adanya suatu kesibukkan dalam bekerja banyak atau bersikap apatis terhadap anak banyak orang tua yang jarang maupun tidak pernah mengajarkan anak-anaknya sedini mungkin tentang agama, sehingga dalam pertumbuhan menjadi dewasa ia tidak mempersoalkan tentang agama yang diyakininya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari tidak mempermasalahkan akan adanya pasangan beda agama hingga sampai kejangkauan pernikahan atau perkawinan.
- 3) Latar belakang orang tua. Dalam hal ini orang tua seharusnya berperan besar dalam kehidupan anaknya hingga ia menjadi dewasa karena perkawinan beda agama tidak lepas dari adanya latar belakang orang tua. Banyak pasangan yang menikah beda agama juga karena melihat orang tuanya adalah pasangan yang berbeda agama, mungkin bagi mereka perkawinan beda agama tidak menjadi suatu masalah apabila menikah dengan pasangan yang berbeda keyakinan karena berdasarkan latar belakang orang tua. Tentu apabila kehidupan orang tua mereka akan berjalan harmonis maka akan menjadi sebuah contoh bagi anak-anak mereka kelak dalam perkawinan beda agama.
- 4) Keluarga bukan menjadi penentu dalam memilih calon suami/istri. Dalam zaman sekarang keluarga tidak lagi ikut andil dalam menentukan calon mana yang terbaik untuk calon mempelai pria dan wanita seolah-olah peraturan didalam keluarga sudah menjadi hilang. Sehingga menyebabkan banyak pasangan yang berbeda agama tidak mempersoalkan akan hal tersebut hal itu apabila timbulnya kecocokan diantara mereka akan dilanjutkan dengan sebuah perkawinan tanpa mendengar saran dari keluarga karena mereka sudah dibuktikan akan sebuah cinta.⁸

⁸ Markalew, J.M. (2013). Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Lex privatum, Vol 1, hlm.2

3.2 Bagaimana akibat Hukum terhadap adanya penetapan pengadilan negeri permohonan pernikahan beda agama kasus perkara perdata Nomor 454/Pdt.P/2018/PN.SKA.

Perkawinan beda agama merupakan “perkawinan antar seorang pria dan wanita yang karena beda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹ Keanekaragaman serta ditunjang dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang , menyebabkan terkikisnya jurang pemisah dalam berinteraksi antar manusia dengan manusia lain, tidak terkecuali dalam perkawinan beda agama.

Masalah perkawinan bukan sekedar masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan saja tetapi juga merupakan masalah yang berkaitan dengan keagamaan yang erat sekali hubungannya dengan kerohanian orang. Sebagai masalah keagamaan, karena setiap agama mempunyai aturan-aturan tersendiri tentang perkawinan, maka pada prinsipnya perkawinan diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari ajaran agama yang dianutnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut sistem norma penunjuk (*Verwijizing*) pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing.¹⁰

Maka permasalahan yang dapat timbul apabila dilangsungkannya suatu perkawinan beda agama antara lain:

1. Keabsahan perkawinan. Mengenai sahnya perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUP. Hal ini berarti UU Perkawinan menyerahkan keputusannya sesuai dengan ajaran dari agama masing-masing. Namun, permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut membolehkan untuk dilakukannya perkawinan beda agama. Misalnya, dalam ajaran islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam.

⁹ Rusli SH dan R.Tama SH, 1986, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung:Pionir Jaya, hal.17

¹⁰Sudargo Gautama, 1980, *Hukum Antar Golongan*, Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, hal.12

2. Pencatatan perkawinan. Apabila perkawinan beda agama tersebut dilakukan oleh orang yang beragama Islam dan Kristen, maka terjadi permasalahan mengenai pencatatan perkawinan. Apakah di Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil oleh karena ketentuan pencatatan perkawinan untuk agama Islam dan di luar agama Islam berbeda. Apabila ternyata pencatatan perkawinan beda agama akan dilakukan di Kantor Catatan Sipil, maka akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah perkawinan beda agama yang dilangsungkan tersebut memenuhi ketentuan dalam pasal 2 UUP tentang syarat sahnya suatu perkawinan. Apabila pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut UUP maka ia dapat menolak untuk melakukan pencatatan perkawinan pasal 21 ayat (1) UUP.
3. Status anak. Apabila pencatatan perkawinan pasangan beda agama tersebut ditolak, maka hal itu juga akan memiliki akibat hukum terhadap status anak yang terlahir dalam perkawinan. Menurut ketentuan pasal 42 UUP, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Oleh karena tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, maka menurut hukum anak tersebut bukanlah anak yang sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya pasal 2 ayat (2) jo. pasal 43 ayat (1) UUP.
4. Perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Apabila ternyata perkawinan beda agama tersebut dilakukan di luar negeri, maka dalam kurun waktu satu tahun setelah suami istri itu kembali ke wilayah Indonesia harus mendaftarkan surat bukti perkawinan mereka ke Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka pasal 56 ayat (2) UUP. Permasalahan yang timbul akan sama seperti halnya yang dijelaskan dalam poin 2. Meskipun tidak sah menurut hukum Indonesia, bisa terjadi Catatan Sipil tetap menerima pendaftaran perkawinan tersebut.

Pencatatan di sini bukan dalam konteks sah tidaknya perkawinan, melainkan sekedar pelaporan administratif.¹¹

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bustanul Arifin bahwa sistem “perkawinan kita sekarang tidak lagi tempat untuk perkawinan yang bersifat sekuler, seperti perkawinan perdata pada masa lalu, karena pancasila tidak menampung hal-hal yang bersifat sekuler”.¹²

Penetapan dapat diartikan sebagai isbat yang mempunyai arti penetapan, penyugguhan, penentuan.¹³ Dan juga penetapan hanya berlaku pada pemohon, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh dari haknya.¹⁴ Asas putusan dalam “penetapan tidak memiliki kekuatan esekutorial hal ini karena amar putusan yang bersifat Deklaratoir sehingga tidak memiliki nilai kekuatan eksekusi”.¹⁵ Suatu penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan akan menimbulkan akibat hukum dalam hal ini adanya penetapan pengadilan mengenai perkawinan beda agama kasus perkara perdata Nomor 454/Pdt.P/2018/PN.SKA.

3.3 Pertimbangan hakim dalam penetapan nomor perkara perdata Nomor 454/Pdt.P/2018/PN.SKA

Pertimbangan hakim adalah “pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringangkan atau memberatkan pelaku. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung”.¹⁶ Dan dalam pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.¹⁷ Data dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan pertama yang difokuskan pada pertimbangan hakim pada bagian Tentang Hukumnya. Pertimbangan hakim pada bagian Tentang Hukumnya

¹¹ Akibat hukum perkawinan beda agama, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6918/kawin-beda-agama-itu-kirakira-bakal-munculin-permasalahan-apa-aja-ya/> diakses pada tanggal 20 Juni 2019 pada pukul 18.30

¹² Ichtiyanto, 2003, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, hal. 81-82.

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal.339

¹⁴ Raihan A.Rasyid, 1991, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Cv.Rajawali, hal.73

¹⁵ Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.331

¹⁶ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama cent V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal.140

¹⁷ Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, hal.94

merupakan konstruksi hukum yang menjadi dasar pemikiran hakim dalam mengambil keputusan untuk menetapkan diberikannya ijin kepada Pemohon dan memerintahkan kepada Pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan dan mencatat di dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa terdapat 20 hal yang dipertimbangkan oleh hakim,

Pertimbangan Hakim dalam kasus tersebut Adalah adanya Diskresi dari pengadilan oleh hakim dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka hakim menetapkan perkawinan dengan berlandaskan bahwa sebuah negara menjamin kemerdekaan kebebasan memilih agamanya, beribadah pasal 29 (2) Uud 1945. Juga pemberian hak untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah pasal 28B UUD 1945, juga pasal 35 UU No 23 Tahun 2006, perkawinan yang ditetapkan pengadilan (perkawinan beda agama) dan juga mempertimbangkan Kepres Nomor: 6 Tahun 2000 jo. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: MA/12/2006 yang mengakui agama Islam , Kong Hu Cu, Kristen ,Katolik,Hindu dan Budha termasuk pergaulan antar suku, ras dan golongan di Indonesia selain itu perkawinan beda agama merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang memang sangat beragam adat,Agama dan Budayanya.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan dari pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

- 1) Faktor penyebab terjadinya perkawinan beda agama dapat dilihat antara lain adanya Diskresi dari pengadilan oleh hakim dalam undang-undang perkawinan tentang pengaturan mengenai perkawinan beda agama, adanya pengaruh budaya setempat, latar belakang orang tua, pendidikan yang minim tentang agama, keluarga bukan penentu perkawinan, rasa cinta satu sama lain dan kebebasan individu.
- 2) Akibat hukum terhadap perkawinan beda agama apabila dilihat dalam putusan Mengabulkan permohonan para pemohon, Memberikan izin

kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Surakarta,Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para pemohon di buku register pencatatan perkawinan, Sebagai yurisprudensi untuk menyelesaikan perkara yang sama. Sedangkan akibat hukum perkawinan beda agama antara lain Keabsahan perkawinan beda agama tersebut, Pencatatan perkawinan,Status anak dan hak waris.

- 3) Pertimbangan hakim dalam penetapan nomor perkara perdata Nomor 454/Pdt.P/2018/PN.SKA adalah adanya diskresi dari pengadilan oleh hakim dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka hakim menetapkan perkawinan dengan berlandaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan kebebasan memilih agamanya, beribadah (pasal 29 (2) UUD 1945. Juga pemberian hak untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah pasal 28B UUD 1945, juga pasal 35 UU No 23 Tahun 2006, perkawinan yang ditetapkan pengadilan (perkawinan beda agama) dan juga mempertimbangkan Kepres Nomor: 6 Tahun 2000 jo. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: MA/12/2006 yang mengakui agama Islam, Kong Hu Cu, Kristen ,Katolik,Hindu dan Budha termasuk pergaulan antar suku, ras dan golongan di Indonesia selain itu perkawinan beda agama merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang memang sangat beragam adat,Agama dan Budayanya.

4.2Saran

Berdasarkan atas hasil pembahasan diatas dan simpulan penelitian ini dapat diajukan saran bahwa pertama perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat tentang akibat perkawinan beda agama, yang kedua memberikan wawasan kepada anak tentang ilmu agama dan memberikan peran keluarga kepada anak, yang ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu ditinjau kembali dan bila perlu dilakukan revisi agar dapat memenuhi aspirasi dan hak untuk setiap orang

berhak menikah dan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah baik dalam perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A.Rasyid Raihan, 1991, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Cv.Rajawali

Arto Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama cent V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Gautama Sudargo, 1980, *Hukum Antar Golongan*, Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve

Harahap Yahya, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta:Sinar Grafika

Hamzah Andi ,1996, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta

Ichtiyanto, 2003, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan

Kasdi Abdurrohman, 2001, *Masail Fiqiyah Kajian Fiqih Atas Masalah-Masalah Kontemporer*, Kudus: Nora Media Enterprise,

M. Karsayuda, 2006, *Perkawinan Beda Agama (Menakar Nilai-Nilai Keadilan Hukum Islam)*, Yogyakarta: Total Media

Ny. Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan dan Undang Undang*, Yogyakarta :Liberty

R.Tama SH dan Rusli SH, 1986, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung:Pionir Jaya

Sostroatmojo Arso, 1978, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Bulan dan Bintang

W.J.S. Poerwadarminta, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka

JURNAL

Markalew,J.M.(2013).Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Lex privatum, Vol 1, hlm.2

WEBSITE

Akibat hukum perkawinan beda agama, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6918/kawin-beda-agama-itu-kirakira-bakal-munculin-permasalahan-apa-aja-ya/>

Kitab Hukum Kanonik 1983, “ <http://www.imankatolik.or.id/khk.php?q=823-827>”